

LATAR BELAKANG BERKUASANYA KEMBALI TALIBAN DI AFGHANISTAN PADA TAHUN 2021

Desfi Indah Salsabila

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

151190043@upnyk.student.ac.id

Dra. Harmiyati, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

harmiyati@upnyk.ac.id

Abstrak

Pada 1996–2001, Taliban, sebuah kelompok yang dibentuk oleh Mullah Omar pada tahun 1994 yang berbasis di wilayah Hermand, Kandahar, dan Uruzgan sempat menguasai Afghanistan dengan membentuk sebuah negara yang mereka akui secara de facto yaitu Keamiran Islam Afghanistan yang pada 2001 berhasil digulingkan oleh Amerika Serikat melalui kampanye kontraterorisme, *War on Terrorism*. Namun pada 15 Agustus 2021 lalu, Taliban berhasil mengambil kekuasaan Kota Kabul hanya dalam kurun waktu 2 minggu sejak Amerika Serikat, sekutu dan NATO menarik mundur pasukannya. Mudah-mudahan Taliban mengambil alih kekuasaan menandakan bahwa Taliban memiliki cukup legitimasi serta adanya perubahan konstruksi identitas membuat kelompok ini dengan begitu mudah menguasai wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Taliban hingga dapat berkuasa kembali di Afghanistan pada tahun 2021. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan Teori Legitimasi dan Teori Konstruktivisme di mana melalui kedua teori ini akan dapat disimpulkan bagaimana setelah 20 tahun sejak rezim pertama, Taliban kemudian dapat menguasai kembali pemerintahan Afghanistan.

Kata Kunci: Taliban, Afghanistan, Kembalinya Taliban, Legitimasi, Konstruktivisme

Abstract

In 1996-2001, the Taliban, a group formed by Mullah Omar in 1994 based in the Hermand, Kandahar and Uruzgan regions briefly ruled Afghanistan by forming a de facto state they recognized as the Islamic Emirate of Afghanistan which in 2001 was successfully overthrown by the United States through a counterterrorism campaign, the War on Terror. However, on August 15, 2021, the Taliban managed to take control of Kabul City in just two weeks since the United States, allies and NATO withdrew their troops. The ease with which the Taliban took power indicates that the Taliban has enough legitimacy and the changing construction of identity makes this group so easily control the territory. This research aims to find out what is behind the Taliban to regain power in Afghanistan in 2021. This research will be analyzed using Legitimacy Theory and Constructivism Theory where through these two theories it will be concluded how after 20 years since the first regime, the Taliban was able to regain control of the Afghan government.

Keywords. Taliban, Afghanistan, Taliban's Return, Legitimacy, Constructivism

PENDAHULUAN

Taliban merupakan gerakan politik religius dan militan yang berarti *students of islam* yang awal kemunculannya beranggotakan kumpulan murid madrasah yang berasal dari golongan kurang mampu. (Nojumi, 2002) Pada awal dibentuknya kelompok ini oleh Mohammed Omar yang merupakan mantan mujahidin (pejuang perang) Perang Soviet – Afghanistan, ada rasa tidak puas terhadap pengimplementasian hukum Islam syariah di Afghanistan. Para Mujahidin Afghanistan ini merupakan orang – orang yang datang dari beberapa kelompok pemberontak islami yang ikut serta dalam perjuangan melawan Uni Soviet saat menginvasi Afghanistan pada 1979. Selepas mundurnya Uni Soviet pada 1989, terjadi kekosongan kekuasaan di Afghanistan. Mujahidiin yang berasal dari berbagai kelompok berbeda pun saling memperebutkan kekuasaan yang menyebabkan terjadinya perpecahan kembali di Afghanistan.

Dalam masa pemerintahan Taliban di Afghanistan, perselisihan antar dua

faksi mujahidin yaitu faksi Gulbuddin Hekmatyar dengan faksi Burhanuddin Rabbani dapat terkendali sehingga terbangunnya stabilitas keamanan dan juga stabilitas kekuasaan. Taliban kemudian berhasil mengonstruksikan identitas Afghanistan menjadi negara yang dapat memberikan perlindungan bagi para mujahidin bahkan pernah menjadi pelindung bagi Osama bin Laden, seorang pemimpin jaringan teroris Al - Qaeda. Taliban meraih puncak kejayaannya pada rentang tahun 1996 - 2001 di mana kelompok ini berhasil menguasai 90% wilayah di Afghanistan dan menggulingkan pemerintahan Afghanistan. Berhasilnya Taliban dalam mengambil alih pemerintahan membuat Taliban membentuk sebuah negara *de facto* yaitu Keamiran Islam Afghanistan atau *Da Afghanistan Islami Amarat* dengan fokus untuk mengontrol negara secara penuh.

Dalam masa pemerintahan Taliban di Afghanistan, perselisihan antar dua faksi mujahidin yaitu faksi Gulbuddin Hekmatyar dengan faksi Burhanuddin Rabbani dapat terkendali sehingga terbangunnya stabilitas keamanan dan juga stabilitas kekuasaan. Taliban kemudian berhasil mengonstruksikan identitas Afghanistan menjadi negara yang dapat memberikan perlindungan bagi para mujahidin bahkan pernah menjadi pelindung bagi Osama bin Laden, seorang pemimpin jaringan teroris Al - Qaeda. Taliban meraih puncak kejayaannya pada rentang tahun 1996 - 2001 di mana kelompok ini berhasil menguasai 90% wilayah di Afghanistan dan menggulingkan pemerintahan Afghanistan. Berhasilnya Taliban dalam mengambil alih pemerintahan membuat Taliban membentuk sebuah negara *de facto* yaitu Keamiran Islam Afghanistan atau *Da Afghanistan Islami Amarat*.

Pada akhir 2001, Amerika Serikat dengan dukungan sekutunya mulai melakukan invasi di wilayah Afghanistan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Taliban serta untuk menangkap Osama bin Laden yang diduga

bertanggung jawab atas aksi teror Penyerangan 11 September. Pemimpin Taliban pada saat itu yaitu Mullah Omar, memutuskan untuk tidak memberikan Osama bin Laden walaupun sudah mendapatkan masukan dari Arab Saudi untuk menerima tawaran kooperatif tersebut.

Gagalnya negosiasi membuat Amerika Serikat dengan sekutunya melancarkan operasi militer yaitu Operation Enduring Freedom pada 7 Oktober 2001 dan berhasil menjatuhkan Taliban. Setelah berhasil menggulingkan kepemimpinan Taliban di bulan Desember 2001, *United Nations Security Council* (UNSC) mendirikan *International Security Assistance Force* (ISAF) yang didirikan berdasarkan hasil dari Bonn Agreement. Bonn Agreement merupakan hasil dari konferensi Bonn yang berisi tentang pembentukan pemerintahan sementara Afghanistan dikarenakan adanya kekosongan pemerintahan sebagai dampak dari mundurnya Taliban. (Washington Post, 2001) Melalui *Bonn Agreement*, Hamid Karzai terpilih untuk menjalani masa jabatannya sebagai ketua pemerintahan sementara.

Melalui proses pemberontakan yang cukup panjang, di tahun 2018 Taliban sempat melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat yang menghasilkan *Doha Agreement* yang disepakati pada tahun 2020. *Doha Agreement* berisi tentang komitmen Amerika Serikat untuk menarik pasukannya dan kesepakatan bahwa Taliban tidak akan menyerang pasukan Amerika Serikat serta kelompok militan lain seperti Al-Qaeda dilarang beroperasi. Amerika Serikat juga memiliki komitmen untuk segera menutup lima markas militernya dengan jangka waktu terhitung 135 hari sejak penandatanganan perjanjian.

Penarikan pasukan militer Amerika Serikat, Sekutu, dan NATO pada 30 Agustus 2021 menandakan dihentikannya dukungan perlindungan militer yang telah hadir selama 20 tahun di negara tersebut. Penarikan pasukan ini dimanfaatkan Taliban untuk segera menguasai wilayah-wilayah seperti Kunduz,

Kandahar, Mazar–I–Sharif yang diikuti dengan dikuasainya Ibu Kota Kabul dalam waktu satu hari saja. Pendudukan Ibu Kota Kabul oleh Taliban menjadi alasan Presiden Ashraf Ghani untuk meninggalkan negaranya yang kemudian digantikan oleh wakilnya yaitu Amrullah Saleh. Namun, pergantian kepemimpinan ini tidak bertahan lama dikarenakan tonggak pemerintahan kembali berpindah kepada kelompok Taliban. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan apa saja faktor yang kemudian melatarbelakangi Taliban hingga akhirnya bisa kembali berkuasa di Taliban pada tahun 2021.

LANDASAN TEORI

Teori Legitimasi

Legitimasi atau keabsahan merupakan keyakinan dari anggota masyarakat akan wewenang yang ada pada kelompok atau pun individu tertentu merupakan sah dan patut untuk dihormati. (Budiarjo, 2008) Dalam suatu lingkungan politik, maka orang atau kelompok yang dianggap memiliki legitimasi, akan selalu mencoba dan membangun serta mempertahankan keabsahan posisinya di kalangan masyarakat agar tetap mendapatkan dukungan. Sebuah negara maupun kepemimpinan haruslah mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain yang ditujukan untuk mencapai tujuan negara seperti pembangunan dan keamanan. (Giley, 2013)

Max Weber turut menjelaskan bahwa terdapat 3 bentuk dari legitimasi politik. (Fathali, 2017) Pertama, Legitimasi Tradisional dimana legitimasi ini diperoleh melalui kebiasaan masyarakat serta bertumpu pada tradisi. Legitimasi ini didapatkan dari individu maupun kelompok dominan yang memiliki hak istimewa yang melekat pada tradisi. Kedua, ialah Legitimasi Karismatik yang didapatkan melalui ide dan karisma pribadi seorang pemimpin yang didapatkan melalui wibawanya dalam mendominasi suatu kelompok. Legitimasi khususnya diberikan kepada pemimpin yang

potensial selama periode krisis dengan harapan akan menghasilkan suatu perbuatan yang transformatif. Yang terakhir ialah Legitimasi Rasional-Legal dimana legitimasi ini tidak terletak pada satu individu tertentu namun pada rasionalitas dan kapasitas suatu sistem dalam menghasilkan kebijakan serta berasal dari sistem dimana Lembaga pemerintahan menetapkan dan menegakkan hukum untuk kepentingan umum.

Di Afghanistan, suku Pashtun merupakan suku dengan jumlah populasi terbesar dengan total 37% dari total populasi penduduk di Afghanistan. Taliban sendiri merupakan kelompok yang pada kemunculan pertamanya berbasis di wilayah Helmand, Kandahar dan juga Uruzgan yang mayoritas penduduknya bersuku Pashtun dan Durani Pashtun. Jika dilihat melalui sudut pandang kesamaan suku, Taliban yang banyak didominasi oleh suku Pashtun, tentu mendapatkan dukungan sebagian kelompok suku tersebut. Selain adanya dukungan karena kesamaan suku, adanya kesamaan ideologi juga turut menjadi alasan pendukung bagaimana Taliban masih mendapatkan dukungannya.

Afghanistan merupakan daerah di mana ideologi ekstremis dan misoginis Taliban dapat berkembang dengan mudah yang disebabkan sejak tahun 1978 pada saat Kudeta Komunis, masyarakat telah menerima doktrin literatur ekstremis sehingga dengan mudah menerima dan merangkul Taliban. Oleh karena itu, Taliban masih memiliki keeksistensinya di Afghanistan. Selain itu pada tahun 2018, Amerika Serikat dan Taliban pernah melakukan pembicaraan yang menjadi bagian dari upaya Amerika Serikat untuk menjalin kesepakatan dengan Taliban sebagaimana yang sudah mereka upayakan sejak 2001. (Graham-Harrison, 2020) Perjanjian tersebut menetapkan batas pertempuran untuk Amerika Serikat dan Taliban serta mengatur penarikan semua pasukan Amerika Serikat maupun NATO dari wilayah Afghanistan dengan imbalan komitmen kontra-terorisme Taliban.

Melalui Legitimasi tradisional, Taliban menerima legitimasi dari masyarakat lokal karena adanya kesamaan identitas dan ideologi khususnya

yang berasal dari masyarakat suku Pashtun. Adanya kesamaan identitas ini dimanfaatkan Taliban untuk menarik simpati dari masyarakat khususnya di daerah konservatif. Tak hanya berupaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat lokal, secara implisit Taliban menerima pengakuan dari negara lain seperti Amerika Serikat dengan adanya Doha Agreement, Pakistan dan juga China.

Dengan diadakannya pertemuan antara Amerika Serikat - Taliban hingga penandatanganan perjanjian, maka Amerika Serikat telah menganggap bahwa kelompok Taliban bukanlah kelompok teroris namun kelompok yang memiliki peran penting dalam proses perdamaian. Taliban pun dapat dianggap memiliki kekuatan politik yang sah hingga dapat dimintai pertanggung jawabannya. Tidak hanya Amerika Serikat saja yang tampak secara implisit memberikan dukungan terhadap Taliban melalui pertemuan mereka di Doha lalu. (Baldor, 2018) Negara yang secara langsung saling berbagi perbatasan dengan Taliban yaitu Pakistan juga turut mendukung kembalinya kelompok ini dalam memimpin. China juga menjadi salah satu negara yang memberikan dukungannya terhadap kembalinya Taliban ini. (Bimo, 2021) Tentu saja dukungan-dukungan yang diberikan berhubungan dengan kepentingan masing-masing negara namun dukungan ini pun kemudian semakin menambah legitimasi yang Taliban terima sehingga akhirnya dapat kembali memimpin di Afghanistan.

Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme dalam hubungan internasional menganggap bahwa negara bertindak sesuai dengan bagaimana negara tersebut melihat dunia. Pandangan ini muncul melalui identitas yang terbentuk dari pengalaman dan normal sosial yang dianut oleh negara tersebut. (Behraves, 2011) Lingkungan internasional oleh para konstruktivis dipandang bukan sebagai hal yang *given* melainkan merupakan sesuatu hal yang terbentuk karena adanya

interaksi masyarakat di waktu dan tempat tertentu.

Menurut Alexander Wendt, hubungan internasional lebih terbentuk secara sosial daripada historikal. (Mahdi, 2020) Setidaknya terdapat tiga aspek umum konstruktivisme yaitu *intersubjective understanding* di mana ide, norma, konsep, asumsi dan nilai merupakan pengendali politik global yang secara luas dimiliki oleh para aktor. Berbeda dengan struktur material yang dimiliki oleh realis, konstruktivis mengasumsikan adanya struktur ideasional. Dalam konteks ini, konstruktivis juga bersifat empiris namun yang diamati bukan dunia atau struktur materialnya melainkan ide para subyek yang mendefinisikan hubungan internasional.

Terdapat dua gagasan kunci yang relevan bagi studi Hubungan Internasional menurut teori konstruktivisme (Pramono, 2010): pertama, bahwa *shared ideas* (gagasan yang diyakini bersama) lebih menentukan struktur – struktur yang menyatukan umat manusia daripada kekuatan material. Kedua, ialah kepercayaan bahwa *shared ideas* merupakan penentu identitas serta kepentingan aktor-aktor dari pada faktor-faktor alam yang berarti bahwa motif tidak semata-mata menentukan tindakan setiap aktor, melainkan ada interaksi antar individu dalam lingkungan sekitar (struktur sosial, politik, ekonomi, budaya) yang membentuk tindakan setiap aktor.

Kembalinya Taliban hingga dapat menguasai pemerintahan di Afghanistan juga akan ditinjau melalui Teori Konstruktivis. Sebagai kelompok islam radikal, identitas tersebut sangat berpengaruh terhadap tindakan dan juga tujuan mereka. Selama ini kelompok Taliban melakukan aksinya dengan tujuan untuk menegakkan interpretasi mereka terhadap islam kedalam aturan negara secara ketat. Gagasan bersama tentang pemerintahan islam dan keyakinan akan kemampuan Taliban untuk menegakkan dan kembali mengembalikan nilai-nilai tradisional turut memberikan dampak terhadap dukungan mereka. Selain itu perlawanan terhadap tindakan korupsi yang marak dilakukan di Afghanistan digunakan Taliban untuk menggambarkan perlawanan mereka demi

menegakkan kedaulatan nasional dan nilai-nilai Islam. Narasi ini dibangun Taliban dengan tujuan untuk menggerakkan dukungan dengan mengonstruksikan identitas mereka sebagai alternatif yang layak dalam memimpin Afghanistan.

Amerika Serikat atas kembalinya Taliban ke Afghanistan telah dipengaruhi oleh adanya konstruksi sosial yang terbentuk melalui aktor-aktor hubungan internasional seperti negara, organisasi dan kelompok non-negara. Sebelum tahun 2021, Amerika Serikat mengonstruksikan Taliban dengan mengidentifikasi kelompok tersebut sebagai kelompok teroris global yang mengancam keamanan global. Namun, seiring berjalannya waktu, konstruksi Amerika Serikat dan aktor-aktor hubungan internasional lainnya terhadap Taliban telah berubah. Adanya perubahan konstruksi identitas oleh Amerika Serikat kepada Taliban dapat dilihat melalui upaya untuk mencapai kesepakatan damai dengan Taliban seperti melakukan pertemuan dan menandatangani *Doha Agreement*. Perubahan ini dalam pandangan konstruktivisme dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang berubah seiring waktu. Hal ini tercermin dari bagaimana Amerika Serikat memandang Taliban yang sebelumnya merupakan musuh menjadi aktor politik yang posisinya dapat diperhitungkan dalam geopolitik di Afghanistan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif yang memanfaatkan data sekunder. Hasil dari jenis penelitian ini adalah kata-kata yang tertulis dalam menganalisis fenomena yang dialami oleh subjek.

Teknik Penumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah studi literatur dengan menggunakan analisis konten melalui media online maupun media fisik seperti buku yang mayoritas mengutip tulisan Abubakar Eby Hara dalam buku Pengantar Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme sampai Konstruktivisme dalam memberikan

pemahaman penulis terhadap definisi dari Teori Konstruktivisme. Penulis juga banyak mengutip sumber penulisan dari Wisnu Suhardono dalam jurnalnya "Konflik dan Resolusi" yang memberikan definisi akan Teori Legitimasi dan aplikasinya terhadap topik yang penulis ambil. Website juga merupakan sumber studi literatur penulis dengan mengutip web yang membahas hal - hal terkait Taliban seperti *Euro News*, CNN, Kompas, dan *Atlantic Council*. Website pemerintah yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan topik penulisan seperti website resmi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga turut menjadi sumber analisis konten.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menerangkan bagaimana suatu fenomena terjadi melalui fakta-fakta yang dikumpulkan dan dianalisis melalui kerangka berpikir yaitu menggunakan Teori Legitimasi dan Teori Konstruktivisme.

PEMBAHASAN

Awal Mula Berkuasanya Taliban di Afghanistan

Taliban yang dipimpin oleh Mullah Omar menguasai Afghanistan untuk pertama kalinya pada rentang tahun 1996 – 2001 dengan menguasai 90% wilayah Afghanistan dan mendeklarasikan Keamiran Islam Afghanistan secara *de facto*. Pada saat itu terdapat tiga negara yang mengakui kepemimpinan Taliban yaitu Pakistan, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Lima tahun pasca kepemimpinan Taliban, Amerika Serikat dan sekutu pun melancarkan operasi militer Operation Enduring Freedom pada 7 Oktober yang dilatarbelakangi gagalnya negosiasi antar Taliban dan Amerika Serikat dalam upaya Amerika Serikat untuk menangkap Osama bin Laden yang menjadi terduga otak dari penyerangan 11 September. Operasi militer yang kemudian dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutu ini pun kemudian berhasil menggulingkan kepemimpinan pertama Taliban di Afghanistan. Jatuhnya kepemimpinan pertama Taliban di Afghanistan pun menyebabkan terjadinya perubahan baik dalam sektor politik, sosial maupun ekonomi yang

signifikan.

Taliban yang dipimpin oleh Mullah Omar menguasai Afghanistan untuk pertama kalinya pada rentang tahun 1996 - 2001 dengan menguasai 90% wilayah Afghanistan dan mendeklarasikan Keamiran Islam Afghanistan secara *de facto*. Pada saat itu terdapat tiga negara yang mengakui kepemimpinan Taliban yaitu Pakistan, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Lima tahun pasca kepemimpinan Taliban, Amerika Serikat dan sekutu pun melancarkan operasi militer *Operation Enduring Freedom* pada 7 Oktober yang dilatarbelakangi gagalnya negosiasi antar Taliban dan Amerika Serikat dalam upaya Amerika Serikat untuk menangkap Osama bin Laden yang menjadi terduga otak dari penyerangan 11 September. Operasi militer yang kemudian dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutu ini pun kemudian berhasil menggulingkan kepemimpinan pertama Taliban di Afghanistan. Jatuhnya kepemimpinan pertama Taliban di Afghanistan pun menyebabkan terjadinya perubahan baik dalam sektor politik, sosial maupun ekonomi yang signifikan.

Pasca *Operation Enduring Freedom* pada 2001, PBB bersama dengan Amerika Serikat dan sejumlah besar kelompok politik dan etnis di Afghanistan mengadakan sebuah pertemuan di kota Bonn pada 5 Desember 2001 yang menghasilkan sebuah kesepakatan yaitu *Bonn Agreement*. Tujuan dari diadakannya pertemuan ini ialah untuk memilih pemimpin otoritas sementara negara dan membuat perjanjian untuk mengatur kembali institusi pemerintahan Afghanistan yang saat itu kosong. Pertemuan ini kemudian menghasilkan pembentukan badan otoritas interim yang bertanggung jawab atas administrasi dan keamanan negara selama masa transisi menuju pemilihan umum serta menghasilkan keputusan untuk dilakukannya *Loya Jirga* yang merupakan majelis bagi suku Pashtun untuk menentukan kepala negara baru dalam kondisi tertentu. Melalui *Loya Jirga* ini, Hamid Karzai terpilih sebagai presiden dengan memenangkan 1295 suara dari 1500 delegasi dan secara resmi memimpin negara pada Juli 2002.

Bonn Agreement juga mengatur pemerintah untuk menyusun dan mengadopsi konstitusi baru ini secara resmi di ratifikasi oleh Presiden

Hamid Karzai pada 26 Januari 2004 setelah melalui majelis *Loya Jirga* yang diikuti oleh lebih dari 500 delegasi yang merepresentasikan pria dan wanita di penjuru Afghanistan. (Singh, 2002) Konsitusi baru dalam kurun waktu dua tahun setelah kesepakatan ditanda tangani. Sebelum diambil alih oleh rezim pertama Taliban pada 1996, Afghanistan merupakan negara dengan sistem politiknya yang didasari oleh sistem republik parlementer di mana presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Namun pada tahun 1996, ketika Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan, Taliban menghapus sistem republik parlemen dan menjadikan sistem pemerintahan Afghanistan sebagai pemerintahan otoriter berdasarkan interpretasi mereka terhadap hukum islam. Jatuhnya rezim pertama Taliban pada 2001 kemudian diikuti dengan adanya Bonn Agreement dan konstitusi baru Afghanistan yang mengatur pelaksanaan pemilihan presiden, pemilihan presiden di Afghanistan yang dilaksanakan pada tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014 dan tahun 2019.

Pemilihan umum 2019 ini menyisakan konflik diantara kedua kandidat unggul yaitu Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah yang masing-masing mengklaim atas kemenangan mereka. Adanya konflik pasca pemilu ini menyebabkan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Donald Trump memangkas jumlah dana bantuan ke Afghanistan sebesar \$1 Miliar serta mengancam untuk mengurangi semua bentuk kerja sama setelah gagalnya pembentukan pemerintahan baru. (Lee, 2020) Konflik saling klaim kemenangan yang berjalan selama enam bulan ini pun akhirnya berakhir setelah Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah menandatangani persetujuan pembagian kekuasaan di mana Ashraf Ghani menjadi Presiden dan Abdullah Abdullah menjadi perdana menteri serta mengetuai dewan menteri yang baru.

Berlarut-larutnya konflik antara Afghanistan dan Taliban pun akhirnya membuat Amerika Serikat menginisiasi untuk melakukan sebuah pertemuan untuk mengupayakan terjadinya perdamaian antara Afghanistan dan Taliban di Doha Qatar yang kemudian menghasilkan Doha Agreement pada 29 Februari 2020. (Gatra.com, 2021) Pertemuan ini pun merupakan pertemuan

lanjutan setelah pembicaraan Amerika Serikat dan Taliban pada 2018. Namun dalam pertemuan di Doha ini tidak ada Ashraf Ghani maupun wakil dari Afghanistan yang hadir. Tidak hadirnya Ashraf Ghani maupun wakil dari Afghanistan sendiri dikarenakan, Taliban menolak untuk melakukan pembicaraan dengan tim negosiator pemerintah Afghanistan.

Ditandatanganinya Doha Agreement pada 2020 menyebabkan Amerika Serikat, Sekutu dan NATO menghentikan dukungan perlindungan militer yang selama kurang lebih 20 tahun telah mereka berikan di Afghanistan. Penarikan pasukan ini pun disambut Taliban dengan segera menguasai beberapa wilayah besar di Afghanistan dan akhirnya secara resmi mengambil alih pemerintahan Afghanistan. Menurut laporan pejabat Pakistan, terdapat lebih dari 300.000 pengungsi dengan visa resmi maupun tidak resmi yang memasuki Pakistan. Diambil alihnya pemerintahan dan terhentinya dukungan keamanan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Sekutu pun menyebabkan timbulnya kekacauan serta lonjakan pengungsi yang mengungsi ke negara tetangga.

Taliban dan Hukum Syariah Islam

Taliban dikenal akan penerapan hukum syariahnya yang otoriter yang berdampak merugikan khususnya terhadap kesejahteraan perempuan. Penerapan hukum syariah islam pada rezim pertama Taliban dikenal sangat kejam dan brutal. Dilarangnya wanita untuk meninggalkan rumah tanpa pendamping, anak perempuan hanya diizinkan bersekolah hingga berusia 10 tahun saja, hukum potong tangan bagi pencuri dan berbagai hukuman berdasarkan penafsiran mereka lainnya. Namun, pada saat Taliban dilengserkan oleh Amerika Serikat pada 2001, terdapat kemajuan dan perkembangan terhadap kesejahteraan perempuan di Afghanistan. Seperti tertuang di dalam Konstitusi Negara Pasal 43 dan 44 di mana negara menjamin hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan serta negara yang akan menyusun program-program guna menunjang promosi pendidikan bagi perempuan dan

memberantas buta huruf di negara tersebut. Selain itu negara juga berupaya untuk mensejahterakan perempuan melalui keikutsertaannya dalam penandatanganan *Millenium Development Goals* pada 2004 yang dua dari delapan tujuannya dikhususkan untuk literasi perempuan.

Perempuan di Afghanistan sebelumnya dapat menerima pendidikan secara formal dan hal tersebut juga sudah dijamin oleh konstitusi, bahkan jumlah perempuan yang menempuh pendidikan tinggi di Afghanistan meningkat 20 kali lipat dari 5.000 murid perempuan pada 2001 menjadi lebih dari 100.000 pada tahun 2021. Selain tingkat kemampuan membaca juga meningkat dari 17% pada 2001 menjadi 30% pada 2021 untuk semua kelompok usia. (UNESCO, 2023) Namun seiring kembalinya Afghanistan dibawah kepemimpinan Taliban, peningkatan kesejahteraan perempuan pasca rezim pertama Taliban berakhir telah kembali ke era sebelum tahun 2002, menghentikan kemajuan kesejahteraan yang para perempuan telah terima dalam kurun waktu 20 tahun belakangan.

Tak hanya perampasan hak perempuan baik dalam hal bekerja maupun bersekolah, kembalinya Taliban ke Afghanistan juga telah menimbulkan ketakutan baru akan adanya tindakan represif dan diskriminatif kepada suku tertentu. Salah satu suku yang terancam akan kembalinya Taliban ini ialah suku Shia Hazara. Sebagai kelompok etnis yang menganut ajaran islam shia, suku Shia Hazara memiliki sejarah panjang dalam menerima tindakan persekusi di Afghanistan, salah satunya mereka terima dari kelompok Taliban yang merupakan kelompok yang menganut ajaran islam sunni. Sejak Taliban kembali ke Afghanistan, orang-orang dari kelompok Shia Hazara yang menduduki posisi di pemerintahan harus kehilangan jabatannya dan digantikan oleh orang-orang dari kelompok Pashtun.

Amerika Serikat dalam '*2021 Report on International Religious Freedom: Afghanistan*' memberikan kritikan terhadap bagaimana Taliban memperlakukan perempuan maupun kelompok minoritas. Dalam laporan ini, Amerika Serikat mengkritisi bagaimana Taliban harus menghormati hak-hak

semua warga negara termasuk kelompok minoritas serta menjunjung tinggi hak asasi manusia mereka. Masyarakat internasional juga turut didesak untuk mendukung upaya yang meningkatkan kebebasan beragama di Afghanistan.

Gambar 1.1

Cuitan Juru Bicara Taliban, Zabihullah Mujahid.



Sumber: Twitter.com. 2022.

https://twitter.com/zabehulah_m33/status/1533325371046772736?s=46. Diunduh

Tanggal 14 Juni 2023.

Kritikan Amerika Serikat ini kemudian direspon oleh Zabihullah Mujahid, seorang juru bicara dari pemerintah Taliban. Dalam cuitan tersebut, Zabihulla merespon dengan menyatakan bahwa apa yang Amerika Serikat kritisi melalui laporannya merupakan informasi yang salah. Menurutnya, pada rezim saat ini, Taliban mempersilakan seluruh agama untuk melaksanakan kegiatan keagamaannya secara bebas dan tidak mengakui tuduhan yang laporan tersebut tuliskan.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan atas kembalinya Taliban di Afghanistan pada tahun 2021 lalu. Kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat Afghanistan pada masa sebelum rezim kedua kepemimpinan Taliban pun hilang seiring kembalinya Taliban. Hak perempuan dan anak yang sebelumnya dijamin

oleh konstitusi pun dicabut oleh Taliban dengan adanya pelarangan yang melarang perempuan khususnya untuk melanjutkan pendidikan serta bekerja. Kebebasan berdemokrasi dengan adanya pemilihan umum dalam memilih presiden pun turut dihilangkan oleh kelompok Taliban dengan menghapuskan Komisi Pemilihan Umum di Afghanistan pada Agustus 2021 lalu.

Faktor Yang Melatarbelakangi Berkuasanya Kembali Taliban di Afghanistan

Dalam melihat faktor yang melatarbelakangi berkuasanya kembali Taliban di Afghanistan pada 2021 lalu, terdapat dua faktor yang mempengaruhi. Faktor pertama ialah adanya Legitimasi. Meski mendapatkan banyak kritikan baik di dalam maupun di luar negaranya, tidak bisa dipungkiri bahwa kembalinya Taliban juga dipengaruhi oleh adanya legitimasi dari masyarakatnya. Taliban yang merupakan kelompok dengan mayoritas anggota yang berasal dari suku Pashtun dan Durani Pashtun yang juga merupakan suku dengan jumlah populasi terbesar di Afghanistan kemudian mendapatkan dukungan sebagian masyarakat kelompok tersebut. Adanya pengakuan yang diterima oleh kelompok Taliban di Afghanistan pada 2021 lalu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Taliban dapat kembali mengambil alih Afghanistan.

Sebagai negara yang memiliki indeks tingkat korupsi yang tinggi, Taliban yang dari awal kemunculannya mengklaim bahwa kelompok mereka akan berperang melawan korupsi yang tidak sesuai dengan hukum *syariah* kemudian berhasil mengurangi penyuaian dan penerapan di beberapa sektor pelayanan publik. (Dawi, 2023) Tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan ini pun kemudian menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah. Para pejabat negara dianggap bukan sebagai wakil dari rakyat namun wakil dari diri mereka sendiri dan bekerja hanya untuk kepentingan pribadi. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini kemudian dimanfaatkan Taliban untuk menjalin kerja sama dan menarik perhatian warga setempat dan mengumpulkan dukungan terhadap kelompok

mereka.

Taliban juga berhasil menarik legitimasi masyarakat dengan menjalin hubungan melalui pengaruh dari para tetua suku. Sebagai sebuah negara yang memiliki banyak kelompok suku, di Afghanistan, tetua suku merupakan seseorang yang memiliki kekuatan dalam mengontrol kelompok sukunya. Eratnya hubungan antara masyarakat dan suku ini kemudian dijadikan Taliban sebagai salah satu strateginya untuk kembali mendapatkan dukungan di Afghanistan. Sebagai negara dengan kelompok suku yang beragam, adanya ketua suku tak hanya sekedar berperan dalam pengaturan orang-orang di dalam kelompoknya saja namun kesukuan dan para ketua suku ini juga terhubung dengan tantara, petani dan bahkan anggota kelompok Taliban yang berasal dari suku mereka. Memanfaatkan pengaruh peran ketua suku, Taliban pun menjadikan kemampuan ini sebagai salah satu strategi serta memanfaatkannya untuk memiliki kontrol atas wilayah pedesaan.

Sebagai sebuah negara yang memiliki banyak kelompok suku, di Afghanistan, tetua suku merupakan seseorang yang memiliki kekuatan dalam mengontrol kelompok sukunya. Eratnya hubungan antara masyarakat dan suku ini kemudian dijadikan Taliban sebagai salah satu strateginya untuk kembali mendapatkan dukungan di Afghanistan. Sebagai negara dengan kelompok suku yang beragam, adanya ketua suku tak hanya sekedar berperan dalam pengaturan orang-orang di dalam kelompoknya saja namun kesukuan dan para ketua suku ini juga terhubung dengan tantara, petani dan bahkan anggota kelompok Talibanyang berasal dari suku mereka. Memanfaatkan pengaruh peran ketua suku, Taliban pun menjadikan kemampuan ini sebagai salah satu strategi serta memanfaatkannya untuk memiliki kontrol atas wilayah pedesaan.

Penerapan pajak yang diterapkan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Taliban juga dianggap lebih adil dibandingkan penerapan pajak pada masa pemerintahan resmi. Tingginya tingkat korupsi tak menutup kemungkinan bawa pajak menjadi sektor yang kerap melibatkan aktivitas penyuapan. Untuk

memiliki kontrol atas negara dan penerimaan dari masyarakat, secara hati-hati para pemimpin di Taliban menentukan cara paling efektif dalam mengumpulkan pajak dari masyarakat. Sistem perpajakan yang dirancang oleh Taliban sendiri bahkan memiliki prosedur pengaduan terhadap pajak. Mengutip dari website *The Conversation*, seorang supir di Afghanistan menyatakan bahwa tidak seperti saat membayar pajak kepada Taliban, membayar pajak kepada pemerintah tampak seperti membayar suap.

Taliban juga menarik dukungannya dari kelompok suku Pashtun yang membentuk separuh anggota kelompoknya dan menjadi kelompok suku dengan anggota paling banyak. Dibanding otoritas pemerintahan, Taliban unggul di mata suku Pashtun dikarenakan sistem peradilan Taliban dalam penyelesaian sengketa. Sebagai kelompok suku dengan jumlah populasi terbesar dengan total 37% dari total populasi penduduk di Afghanistan, maka dukungan yang Taliban terima dari kelompok suku ini memiliki arti yang signifikan terhadap legitimasi kembalinya Taliban ke Afghanistan.

Hanya memanfaatkan dukungan dari suku Pashtun saja untuk menarik legitimasi atas kembalinya Taliban di Afghanistan tidaklah cukup. Kelompok Suku Pashtun memanglah kelompok suku dengan populasi terbesar namun secara geografis hal itu hanya berlaku di wilayah selatan dan timur saja. Di wilayah utara yang didominasi oleh suku Tajik, suku Pashtun merupakan suku minoritas di wilayah tersebut. (CNN, 2021) Dalam menghindari adanya penolakan dari wilayah tertentu yang dikarenakan oleh mayoritas populasi suku, Taliban menggunakan taktik dengan menggunakan kehadiran anggota-anggota non-Pashtun. Contohnya di wilayah Samangan yang didominasi oleh suku Tajik, Taliban berhasil mendapatkan dukungan dari suku Tatar. Taktik ini pun cukup menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pengaruh Taliban di wilayah yang didominasi suku lain selain Pashtun.

Taliban memperoleh legitimasi di Afghanistan karena kesamaan kebiasaan, tradisi, dan sejarah dengan masyarakat Afghanistan. Mereka berusaha

mendapatkan pengakuan dan legitimasi sebagai pemimpin negara. Faktor-faktor seperti keinginan untuk menjadikan negara bersyaria Islam, memberantas korupsi, dan menghapuskan ikatan kesukuan memainkan peran penting dalam kembalinya Taliban di Afghanistan. Berdasarkan analisis terhadap situasi di Afghanistan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kembalinya Taliban. Taliban berhasil memperoleh legitimasi melalui kesamaan kebiasaan, tradisi, dan sejarah dengan masyarakat Afghanistan. Keinginan mereka untuk menjadikan negara bersyaria Islam, memberantas korupsi, dan menghapuskan ikatan kesukuan merupakan faktor-faktor yang memainkan peran penting dalam kembalinya Taliban di Afghanistan. Dengan demikian, legitimasi yang diperoleh melalui kesamaan nilai-nilai tradisional masyarakat Afghanistan memberikan dukungan internal bagi Taliban dalam mendapatkan kembali posisinya sebagai pemimpin negara.

Selain secara internal, adanya legitimasi eksternal yang didasari oleh kepentingan masing-masing aktor juga turut menjadi faktor. Hubungan antara Amerika Serikat dan Taliban pada awalnya tidak dimulai secara baik-baik khususnya pada saat Taliban menolak untuk memberikan Osama bin Laden, terduga pelaku penyerangan *World Trade Centre* yang direspon Amerika dengan melakukan aksi kontaterorisme, *Operation Enduring Freedom*. Dimulai pada 2001 dan berakhir pada 2014, *Operation Enduring Freedom* kemudian menyisakan dependensi Afghanistan terhadap Amerika Serikat khususnya dalam bidang keamanan. *Doha agreement* hadir sebagai hasil dari panjangnya upaya perdamaian yang lakukan Amerika Serikat. Selain melakukan pertemuan di Doha Qatar pada 2020 lalu, Amerika Serikat juga telah melakukan upaya lainnya untuk mencapai kesepakatan damai dengan Taliban. Secara singkat perjanjian itu mencakup beberapa poin yang menjelaskan bagaimana Amerika Serikat akan menjamin keikutsertaan Taliban dalam proses perdamaian, dilakukannya gencatan senjata serta Afghanistan yang tidak akan menjadi negara terorisme yang mengancam keamanan Amerika Serikat maupun sekutu. Secara singkat perjanjian itu mencakup beberapa poin yang menjelaskan

bagaimana Amerika Serikat akan menjamin keikutsertaan Taliban dalam proses perdamaian, dilakukannya gencatan senjata serta Afghanistan yang tidak akan menjadi negara terorisme yang mengancam keamanan Amerika Serikat maupun sekutu. Selain Amerika Serikat, Pakistan juga memiliki hubungan yang kompleks dan dinamis dengan Pakistan yang pada rezim pertama kepemimpinan Taliban, Pakistan merupakan salah satu negara yang mengakui Taliban secara *de facto*. Secara singkat perjanjian itu mencakup beberapa poin yang menjelaskan bagaimana Amerika Serikat akan menjamin keikutsertaan Taliban dalam proses perdamaian, dilakukannya gencatan senjata serta Afghanistan yang tidak akan menjadi negara terorisme yang mengancam keamanan Amerika Serikat maupun sekutu.

Kini, pada kepemimpinan kedua Taliban di Afghanistan, Pakistan kembali menjadi salah satu negara yang memberikan dukungannya. Terdapat tiga alasan mendasar yang menjadi alasan mengapa Pakistan mendukung kembalinya Taliban. Adanya kesamaan ideologi antara Pakistan dan Taliban yang berupa nasionalisme Islam merupakan alasan pertamanya. Selanjutnya pemerintah Pakistan memiliki kekhawatiran akan perbatasan wilayahnya dengan Afghanistan yang dibatasi oleh Garis Durand yang sebelum diambil alih oleh Taliban, garis tersebut ditolak oleh pemerintah Afghanistan. Dengan diambil alihnya kepemimpinan oleh Taliban membuat pemerintah Pakistan percaya bahwa ideologi Taliban yang lebih mengedepankan Islam daripada suku Pashtun menghormati kesepakatan Garis Durand ini. Dan yang terakhir ialah konflik panjang antara Pakistan dan India di mana pada masa pemerintahan sebelum Taliban, Ashraf Ghani memiliki hubungan dekat dengan India yang tentu saja mengkhawatirkan Pakistan. Pemerintahan Taliban dipercaya oleh Pakistan bisa menghadapi ancaman India termasuk memberikan tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok jihad anti India.

Terakhir adalah negara China yang juga memberikan dukungannya pada kembalinya Taliban di Afghanistan pada tahun 2021 ini. Terdapat dua alasan

mengapa China mendukung kembalinya Taliban di Afghanistan. (Johnson, 2021) Alasan yang pertama ialah karena China bisa melebarkan sayap bisnisnya dengan melakukan investasi yang berkemungkinan akan didukung oleh Taliban, hal ini disebabkan karena perekonomian negara yang rapi, maka bantuan maupun investasi luarnegeri akan sangat dibutuhkan. Alasan kedua bergantung pada bagaimana kedua belah pihak yang tidak akan ikut campur dalam urusan internal negara masing-masing. Dari sisi China, mereka percaya bahwa dukungan yang diberikan tidak akan membuat Taliban menyebar luaskan ideologinya ke wilayah Xianjiang yang sebagian kecil wilayahnya saling berbagi perbatasan dengan Afghanistan. Dari sisi Taliban, dukungan China mengartikan bahwa negara tersebut tidak akan mempermasalahkan isu hak asasi manusia yang dipersoalkan oleh negara-negara barat.

Berubahnya konstruksi identitas melalui identitas, norma, konsep, asumsi maupun nilai yang terkonstruksi juga turut menjadi faktor yang menyebabkan kembalinya Taliban di Afghanistan pada 2021 lalu. Pada awal kemunculannya, kelompok ini dikenal sebagai gerakan yang melakukan perlawanan terhadap invasi Soviet pada 1980-an. Identitas gerakan awal Taliban ini pun terbentuk sebagai kelompok yang hendak melawan penjajah dan mendirikan negara islam berbasis syariah. Terbentuknya identitas Taliban ini diakibatkan oleh adanya rasa tidak puas yang berasal dari masyarakat atas kekosongan jabatan dan ketidakstabilan negara pasca mundurnya Soviet dari Afghanistan. Sehingga Taliban hadir sebagai kelompok yang dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat pada awal kemunculannya.

Pada awal kemunculannya, kelompok ini dikenal sebagai gerakan yang melakukan perlawanan terhadap invasi Soviet pada 1980-an. Identitas gerakan awal Taliban ini pun terbentuk sebagai kelompok yang hendak melawan penjajah dan mendirikan negara islam berbasis syariah. Terbentuknya identitas Taliban ini diakibatkan oleh adanya rasa tidak puas yang berasal dari masyarakat atas kekosongan jabatan dan ketidakstabilan negara pasca

mundurnya Soviet dari Afghanistan. Sehingga Taliban hadir sebagai kelompok yang dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat pada awal kemunculannya.

Namun identitas tersebut tidak bertahan lama dikarenakan terjalinnya hubungan antara Taliban dengan kelompok yang sudah terlebih dahulu di cap sebagai kelompok teror yaitu Al-Qaeda. Terjalinya hubungan antara Taliban dengan kelompok teroris Al-Qaeda ini pun kemudian secara perlahan merubah identitas Taliban khususnya di dalam negeri. Taliban yang pada awal mendapatkan dukungan dari sebagian kelompok masyarakat karena dianggap hadir sebagai aktor yang dapat menciptakan stabilitas dan keamanan berubah menjadi kelompok yang berperilaku kasar. Hal inilah yang kemudian menyebabkan citra negatif melekat di tubuh Taliban dan semakin terisolasi dari dunia internasional.

Pasca jatuhnya rezim pertama pemerintahan Taliban di Afghanistan, Taliban yang kala itu tersudut mulai melakukan reformasi identitasnya dari yang sebelumnya dikenal sebagai organisasi militan, teror dan represif menjadi apa yang oleh beberapa ahli sebagai "neo-taliban". Neo-Taliban sendiri merupakan bentuk baru dari Taliban yang lahir pada tahun 2002. Mereka mengklaim bahwa telah mengalami perubahan serta melakukan adaptasi. Selain itu ideologi mereka pun mengalami perubahan dan juga memodernisasi kebijakan mereka. Melalui Neo-Taliban yang telah mengubah strategi, mengandalkan kekuatan senjata sudah ditinggalkan dan diganti dengan strategi yang mereka sebut sebagai 'perang generasi keempat' yang menggunakan politik, ekonomi, sosial dan militer. Dilakukannya perundingan dengan Amerika Serikat juga merupakan salah satu strategi yang Taliban gunakan.

Selain mengkonstruksi identitasnya di Afghanistan dengan menggunakan identitas mereka yang bersifat religius, kultural dan politis yang sesuai dengan identitas mayoritas masyarakat Afghanistan yang membanggakan agama, budaya dan juga sejarah mereka, identitas Taliban juga dikonstruksi oleh negara-negara asing sebut saja Amerika Serikat. Oleh

Amerika Serikat pada awalnya identitas Taliban dikonstruksi dengan menggunakan norma dan label terorisme khususnya pada saat Taliban menolak menyerahkan Osama bin Laden dan dituduh sebagai kelompok terorisme yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. (Folse, 2022)

Namun, ditariknya pasukan asing oleh Amerika Serikat kemudian menimbulkan pertanyaan apakah Afghanistan dapat menjadi negara di mana upaya kontraterorisme yang efektif dapat dilakukan. Negara-negara besar maupun Dewan Keamanan PBB turut mendesak Taliban agar segera menumpas kelompok teroris seperti Al-Qaeda, Tahrik-e Taliban Pakistan (TTP) dan kelompok teroris lainnya. Oleh Taliban, kekhawatiran ini dijawab oleh Menteri Luar Negeri Taliban, Amir Khan Muttawi, pada pertemuan antara Taliban dan beberapa negara termasuk Rusia, Cina, Pakistan dan India pada 2021 lalu, Amir Khan menyatakan bahwa tanah Afghanistan yang berada dibawah kepemimpinan Taliban tidak akan menjadi sarang dari kelompok terorisme yang dapat mengancam kedaulatan negara lain.

Penarikan pasukan asing ini sendiri merupakan hasil dari Doha Agreement ini kemudian merupakan salah satu hasil bagaimana negara Amerika Serikat kemudian mengkonstruksi identitas kelompok Taliban dari yang awalnya di cap sebagai kelompok teroris kemudian berubah menjadi kelompok yang dianggap dapat diajak bernegosiasi. Hal ini pun tak luput dari upaya Taliban yang mencoba merubah identitasnya sendiri. Interaksi antara Amerika Serikat dan Taliban ini dapat menjadi bukti bagaimana identitas suatu kelompok maupun aktor tidaklah tetap melainkan dinamis dan dilakukan sesuai dengan kepentingan masing-masing kelompok maupun aktor.

KESIMPULAN

Konflik berkepanjangan antara Afghanistan dan Taliban kemudian menghasilkan *Doha Agreement* melalui intervensi Amerika Serikat diantaranya. Melalui *Doha Agreement*, Amerika Serikat yang menarik pasukan militernya dan menyebabkan melemahnya keamanan Afghanistan kemudian dimanfaatkan

oleh Taliban untuk segera menguasai wilayah-wilayah seperti Kunduz, Kandahar, Mazar-I-Sharif yang diikuti dengan dikuasainya Ibu Kota Kabul.

Taliban memanfaatkan Suku Pashtun yang merupakan bagian populasi terbesar di Afghanistan yang membentuk sebagian besar anggota kelompoknya. Tingginya indeks korupsi serta masyarakat pinggiran yang tidak terjangkau pemerintah juga di manfaatkan oleh Taliban untuk menarik simpatisannya. Secara eksternal, Taliban menerima adanya pengakuan yang didasari oleh kepentingan. Kesepakatan *Doha Agreement* bersama Amerika Serikat merupakan faktor legitimasi terbesar yang menyebabkan kembalinya Taliban. Ketentuan didalam perjanjian mempermudah Taliban untuk menegambil alih negara tanpa takut mendapatkan intervensi.

Adanya perubahan konstruksi identitas juga merupakan faktor yang melatarbelakangi kembalinya kelompok tersebut di Afghanistan pada 2021 lalu. Taliban yang pada awalnya oleh Amerika Serikat di cap sebagai kelompok teroris, kemudian berubah seiring berjalannya waktu sebagai kelompok yang dapat dipertimbangkan posisinya. Adanya pertemuan antara Amerika Serikat dan Taliban di Doha 2021 lalu merupakan bentuk bagaimana Amerika yang mengakui Taliban dapat menjadi salah satu aktor dalam tercapainya upaya damai.

Penelitian ini menemukan bahwa legitimasi baik secara internal maupun eksternal dan perubahan konstruksi identitas merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi kembalinya Taliban di Afghanistan pada 2021 lalu secara signifikan. Melalui penelitian ini dapat dilihat bahwa tidak ada konflik yang abadi di dunia. Konflik dapat mereda ketika pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Sebagai kelompok yang awalnya ditentang dan tidak diterima keberadaannya, upaya-upaya yang dilakukan Taliban agar dapat kembali mengambil posisi di pemerintahan di Afghanistan dapat diperhitungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- . (2001). "Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending The Re-Establishment of Permanent Government Institutions." <https://www.washingtonpost.com/wpsrv/world/texts/bonnagreement.html>
 - . (2021). "4 Besar Etnis Afghanistan, Salah satunya Dominan di Taliban." <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210823120209-120-683971/4-besar-etnis-afghanistan-salah-satunya-dominan-di-taliban>
 - . (2021). "Taliban Gelar Pertemuan dengan Pemerintah Afghanistan di Qatar". <https://www.gatra.com/news-514108/internasional-taliban-gelar-%20681330-perangafghanistan-dan-sejarah-taliban-yang-kembali-berkuasa..html>
 - . (2023). "Let Girls and Women in Afghanistan Learn!". <https://www.unesco.org/en/articles/let-girls-and-women-afghanistan-learn#:~:text=Women's%20presence%20in%20Afghan%20higher,for%20all%20age%20groups%20combined>
- Baldor, Lolita C. (2018). "US Will Have Role in Afghanistan Reconciliation with Taliban". <https://www.militarytimes.com/flashpoints/2018/03/23/us-will-have-role-in-afghan-reconciliation-with-taliban/>
- Behraves, Maysam. (2011). "The Thrust of Wendtian Constructivism." <https://www.e-ir.info/2011/03/09/the-thrust-of-wendtian-constructivism/>
- Bimo, Edwin Shri. (2021). "China Makin Gencar Bujuk Rayu Taliban Janji Bantu Bangun Kembali Afghanistan". <https://www.kompas.tv/internasional/225531/china-makin-gencar-bujuk-rayu-taliban-janji-bantu-bangun-kembali-afghanistan>
- Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dawi, Akmal. 2023. "Can The Taliban Tackle Corruption in Afghanistan". <https://www.voanews.com/a/can-the-taliban-tackle-corruption-in-afghanistan-/6942205.html>. Diunduh Tanggal 23 Mei 2023.
- Folse, Mark R. 2022. The U.S. Army In Afghanistan Operation Enduring Freedom September 2001-March 2002. Washington D.C : Center of Military History, Hal. 1-103
- Giley, Bruce. (2013). "Putting State Legitimacy at The Center of Foreign Operations and Assistane". Prism: A Journal of the Center for Complex Operations. Vol. 4, No, 4, Hal. 67-85.

- Harrison, Emma Grahama, et, al. (2020). "US and Taliban sign deal to withdraw American troops from Afghanistan". <https://www.theguardian.com/world/2020/feb/29/us-taliban-sign-peace-agreement-afghanistan-war>
- Johnson, Ian. (2021). "How Will China Deal With the Taliban?". <https://www.cfr.org/in-brief/china-afghanistan-deal-with-taliban>
- Lee, Mathew. (2020). "US Slashes Aid to Afghanistan After Pompeo Visit to Kabul". <https://apnews.com/article/health-ap-top-news-elections-international-news-virus-outbreak-649879924a532522e51291955170c034>
- Moghaddam, Fathali M. (2017). *The SAGE Encyclopedia of Political Behavior*. Edisi Pertama. California : Sage Publications, California.
- Mostafa, Mahdi et al. (2020). "The Theory of Constructivism in International Relations". *International Research Jurnal of Commerce and Law*. Vol.8 No.10 Hal.1-8.
- Nojumi, Neamatollah. (2002). *The Rise of Taliban in Afghanistan Mass Mobilization, Civil War, And The Future Of The Region*. Edisi Pertama. New York: Palgrave, New York.
- Pramono, S. et al. (2010). "Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik". *Jurnal Spektrum*. Vol.7 No.2 Hal.14-20.
- Singh, Rai. (2002). "Emergency Loya Jirga Shapes Afghanistan's Future". *India Quarterly*. Vol. 58. No.2 Hal.173-1